













- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Ketentuan pidana dalam rumah tangga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 80 yang berbunyi ayat 1 Setiap orang yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Lalu ayat 2 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian dalam ayat 3 dijelaskan dalam hal perbuatan yang dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dan ayat terakhir dijelaskan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana





2. Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.
3. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam rumah tangga.
4. Sanksi pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.
5. Tindak pidana kekerasan anak dalam rumah tangga dalam pandangan islam.
6. Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap kekerasan anak dalam rumah tangga.
7. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda.
8. Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

Masalah kekerasan anak dalam rumah tangga masih memuat suatu masalah yang bersifat umum dan global, sehingga diperlukan suatu pembatasan masalah dalam pembahasannya. Dalam hal ini pembatasan masalahnya adalah :

1. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda.



















masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sub bab terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini secara umum membahas kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum pidana islam. Untuk mendapatkan data yang utuh terlebih dulu diuraikan pengertian kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak, serta gambaran menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta Hukum Pidana Islam terkait kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

Bab ketiga, bab ini berisi data tentang data-data yang diperoleh dari penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. yang meliputi duduk perkara, dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus perkara kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dan amar putusannya.

Bab keempat, bab ini menguraikan tentang analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 771/PID.Sus/2014/PN.Sda.

